

ANALYSIS CENTER OF GROWTH ON THE FAST GROWING AREA

Gugyh Susandy¹, Yanu Endar Prasetyo²

¹Sutaatmadja Economic College, SubangIndonesia
gghsusandy99@gmail.com

²Center for Appropriate Technology Development Indonesian Institute of Sciences, Subang Indonesia

yanuendar@yahoo.com

Abstract

Issues of regional development by most experts regarded as the problems posed by the presence of symptoms (regional inequality). The gap between regions in Subang, West Java Indonesia is one of the serious problems that must be addressed through policy measures with the right strategy. The primary tool that can do a merger between the principles of "centralized" with "decentralized" at once. The integration of sectoral programs and activities at the national, provincial, and district / city, with the activities of businesses and people as needed.

The purpose of this research is expected to boost the development of cooperation between regions functionally, and between regions that are relatively developed with underdeveloped areas around it in an economic development area systems are integrated. Optimizing the management of a specific resource potential areas for improvement of the regional economy and public welfare, sound environmental sustainability.

The analytical method used in this study is qualitative and quantitative. The quantitative analysis used Location Quotient (LQ). This technique is used to identify potential internal possessed an area that sectors which is a sector basis.

The unit of analysis in 10 Districts located in Subang district of West Java province of Indonesia. The commodity sector and the activities of economic resources examined included agriculture (rice, corn, soybeans, fruits, animal husbandry). Furthermore, the trade sector (companies, markets, channels, and transportation). While the industrial sector studied is small industry.

Keywords: Growth Center, Fast Growing Area

I. PENDAHULUAN

Masalah pengembangan wilayah (*Regional Development*) oleh sebagian ahli dianggap sebagai masalah yang ditimbulkan oleh adanya gejala "*regional inequality*", yaitu adanya perbedaan tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta adanya perbedaan tingkat pendapatan dan tingkat kemakrnuran masyarakat. Pengembangan wilayah merupakan usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat setempat atau merupakan alat untuk tercapainya keseimbangan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah.

Kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Subang merupakan salah satu masalah serius yang harus segera ditangani melalui langkah-langkah kebijakan dengan strategi yang tepat. Hal ini jika tidak mendapat perhatian yang serius dikhawatirkan akan

menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya akan menciptakan konflik antar kelompok dan antar wilayah yang akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles*) adalah salah satu teori yang paling terkenal dalam ilmu Ekonomi Regional. Kepopuleran teori ini pada dasarnya timbul karena ia merupakan salah satu alat utama yang dapat melakukan penggabungan antara prinsip-prinsip "konsentrasi" dengan "desentralisasi" secara sekaligus (Allonso,1968). Dengan demikian diharapkan Teori Pusat Pertumbuhan ini merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Disamping itu teori ini merupakan salah satu alat yang paling "ideal" untuk dapat menggabungkan kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu. Karena itu tidaklah mengherankan bila para ahli dan penulis selalu menghubungkan antara Teori Pusat Pertumbuhan dengan dengan teknik perencanaan wilayah.

Analisa pusat-pusat pertumbuhan merupakan salah satu dokumen perencanaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah.

Analisa ini memuat hasil kajian secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu terhadap semua aspek kunci pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sebagai data dasar serta proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam jangka menengah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pengusahaan (*Initiation Plan*) dan Rencana Tindakan (*Action Plan*).

Permendagri nomor 29 Tahun 2008 memberikan salah satu pilihan bagi daerah untuk membangun daerahnya melalui pendekatan pengembangan daerahnya melalui wilayah berupa Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang pada akhirnya mampu memperkuat daya saing perekonomian.

Permendagri hanya merupakan sarana untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang telah berkembang atau potensial berkembang, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya yang relatif masih tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengoptimalkan pemanfaatan komparatif dan kompetitif sektor/produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional.

Prinsip penyusunan Dokumen Analisa Pusat-Pusat Pertumbuhan diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip yang termuat dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2008, pada bab II tentang prinsip dan tujuan pengembangan kawasan, terdapat tujuh poin yang masing-masing secara umum diorientasikan untuk pertumbuhan ekonomi setiap daerah, mulai dari Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi, hingga pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

1.1. Tujuan Penelitian

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan
- c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan
- e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan wilayah

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah mengandung arti yang luas, namun pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah telah diterapkan di berbagai negara melalui berbagai disiplin ilmu.

Konsep-konsep yang pernah berkembang sebelumnya umumnya didominasi oleh ilmu ekonomi regional, walaupun sesungguhnya dalam penerapannya akan lebih banyak tergantung pada potensi pertumbuhan setiap wilayah yang akan berbeda dengan wilayah lainnya, baik potensi SDA, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, dan lainnya. Oleh karena itu maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai beberapa konsep pengembangan wilayah konvensional yang berkembang.

Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya yang dimiliki

Pengembangan wilayah sesungguhnya merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, dalam mengembangkan suatu wilayah diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Penataan Ruang

Pada umumnya konsep ini lebih didasarkan pada penataan ruang wilayah, yang dirinci ke dalam wilayah provinsi dan kota yaitu:

1. Pusat pertumbuhan

Konsep ini menekankan pada perlunya melakukan investasi pada suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat investasi prasarana dasar dengan harapan perkembangan sektor unggulan dapat mengembalikan modal dengan cukup cepat. Sementara pengembangan wilayah di sekitarnya diharapkan diperoleh melalui proses tetesan (*trickle down effect*) ke bawah.

2. Integrasi Fungsional

Konsep ini merupakan suatu alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu wilayah memiliki hirarki. Konsep *center-periphery* yang diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses produksi merupakan pengembangan dari konsep ini.

3. Desentralisasi

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumber daya modal dan sumber daya manusia. Berbagai konsep tersebut di atas tidak secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan karena berbagai macam permasalahannya, serta pada akhirnya belum dapat menciptakan pembangunan secara merata. Pemerintah pusat yang sentralistis cenderung pada konsep pusat pertumbuhan, karena lingkup wilayah yang sangat luas sementara dana pembangunan terbatas. Selain itu, kebijakan sektoral di pusat tidak kondusif dan tidak terpadu di dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pembangunan cenderung bersifat *top down* yang tidak mengakomodasi kebutuhan berbagai pelaku di daerah.

Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu

Pada dasarnya program ini berorientasi pada strategi pemerataan pembangunan, yang dapat berorientasi sektoral apabila terkait dengan beragamnya kegiatan sektoral dalam satu wilayah, dan dapat berorientasi regional apabila terkait dengan upaya suatu wilayah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari suatu kawasan tertentu agar dapat memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih meningkat.

Konsep Pengembangan Wilayah Berdasarkan Klaster

Konsep pengembangan wilayah berikutnya yang mulai dikembangkan di beberapa negara adalah pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama, dan saling tergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dalam bidang aspek unggulan tertentu.

Pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan klaster adalah sektor industri. Model klaster berkembang didasarkan atas kesadaran bahwa industri utama dan unit-unit usaha di sekitarnya saling terkait satu dengan

lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pengembangan wilayah berdasarkan kluster terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam suatu jaringan kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya.

2.2 Teori Pusat Pertumbuhan

Terbentuknya pusat pertumbuhan dapat terjadi secara alami atau dengan perencanaan. Menurut Stohr (1981) dalam Mercado (2002), konsep pusat pertumbuhan mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik. Pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Sehingga pembangunan sinonim dengan urbanisasi (pembangunan di wilayah perkotaan) dan industrialisasi (hanya pada sektor industri).

Pandangan ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan *hinterland* dan pedesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena *trickle down effect* (dampak penetes ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan dengan basis sumber daya di wilayah *hinterland*. Selain itu respon pertumbuhan dipusat tidak cukup menjangkau wilayah *hinterland* karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

Teori Polarisasi Ekonomi

Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Menurut Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi (*polarization of economic growth*).

Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat-pinggiran (*coreperiphery*). Konsep pusat-pinggiran merugikan daerah pinggiran, sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi (urbanisasi), mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah pedesaan.

Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut *spread effect*. Contohnya adalah terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, serta

penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negatifnya disebut *backwash effect*, contohnya adalah adanya ketimpangan wilayah, meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Teori Kutub Pertumbuhan

Konsep kutub pertumbuhan (*growth pole concept*) dikemukakan oleh Perroux, seorang ahli ekonomi Prancis (1950). Menurut Perroux, kutub pertumbuhan adalah pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat memancarnya kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis.

Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi. Contoh: industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan mentah maupun pasar. Industri tersebut juga menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu rangsangan timbulnya kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industri baja.

Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh pendapat August Losch (1945) seorang ahli ekonomi Jerman.

Keduanya berkesimpulan, bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya.

Tempat-tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometrik berdiagonal yang memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral dengan tempat sentral yang lain di sekitarnya membentuk jaringan sarang lebah seperti yang kamu lihat pada gambar samping.

2.3 Tinjauan Kebijakan

Untuk memberi arah dan payung hukum bagi terlaksananya penyusunan Dokumen Analisis Pusat-pusat Pertumbuhan diperlukan dasar-dasar kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
8. Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang.

III. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data adalah dengan cara pengamatan langsung kewilayah yang menjadi isu yang mengemuka pada musrenbang dan data-data kajian yang telah ada pada titik yang menjadi acuan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dan atau yang berpotensi untuk tumbuh. Proses pelaksanaan kajian meliputi:

1. Studi literature terhadap konsep-konsep pengembangan wilayah yang telah pernah dikembangkan.
2. Tinjauan terhadap tantangan bangsa dan Negara pada masa sekarang dan yang akan datang serta berbagai upaya dalam menjawab tantangan tersebut:
 - a. Berbagai teori dan konsep pengembangan wilayah yang menjawab kesenjangan antar daerah.
 - b. Berbagai teori dan konsep pengembangan kawasan dan bisnis untuk menjawab antisipasi pasar global dan perdagangan bebas
 - c. Berbagai teori dan konsep pengembangan ekonomi daerah khususnya berkaitan dengan pemantapan otonomi daerah melalui pengelolaan keterkaitan antar program pengembangan ekonomi berbasis kawasan strategis cepat tumbuh
3. Pengumpulan data dan analisa terkait dengan:

- a. Konsep pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh secara makro (RTRW)
 - b. Rencana pengembangan (*Master Plan*) kawasan strategis cepat tumbuh
 - c. Program sektor-sektor kementerian yang terkait (APBD atau Program Andalan Sektoral)
4. Penentuan faktor-faktor kunci, pola keterkaitan dan model pengelolaan kawasan
 5. Penelitian lapangan, dilakukan dengan menggunakan alat penelitian kuesioner dengan wawancara kepada para pengelola pengembangan kawasan di Bappeda, dinas teknis terkait dan pelaku lainnya
 6. Diskusi intensif dan analisis dengan pakar pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta beberapa narasumber dari unsure sektoral.
 7. Perumusan akhir prinsip-prinsip dasar pengembangan kawasan, kriteria (faktor-faktor kunci) pengembangan kawasan, pola keterkaitan antar program dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, serta pola pengelolaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam bentuk arahan kebijakan pengelolaan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

3.2 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggambarkan kecamatan-kecamatan yang akan dijadikan sebagai Pusat-pusat Pertumbuhan Kabupaten Subang. Analisis kuantitatif digunakan yaitu *Analisis Location Quotient (LQ)*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Makroekonomi Kabupaten Subang

Pembangunan di Kabupaten Subang menunjukkan geliat dan perkembangan pada semua sektor. Kemudahan bagi para investor dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Subang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Subang. Semakin banyaknya para investor mengembangkan usaha terutama pada sektor industri menjadikan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini terus meningkat. Menjadi harapan bahwa selain sektor industri, maka sektor-sektor lainnya juga akan terus memberikan peranan terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Subang yang pada akhirnya dapat memperkuat pencapaian kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang.

Namun berbeda halnya pada sektor industri yaitu sektor pertanian, adanya pembangunan pabrik untuk kegiatan industri menjadikan lahan pertanian yang produktif makin berkurang. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Subang untuk mengantisipasi berkurangnya lahan dengan menciptakan lahan baru yang dapat menggantikan lahan yang alih fungsi menjadi kawasan industri. Mengingat, Kabupaten Subang merupakan salah satu penopang utama perekonomian Jawa Barat di sektor pertanian sebagai daerah penghasil padi ketiga di Jawa Barat.

Pada periode 2011-2013 perekonomian Kabupaten Subang secara makro cenderung melambat. Hal ini ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) yang memperlihatkan laju pertumbuhan secara berlaku sebesar 7,44 persen, sedangkan laju konstannya sebesar 3,10 persen.

**Tabel 4.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kab. Subang Tahun 2011-2013**

Tahun	PDRB Adh Berlaku	PDRB Adh Konstan	LPE Adh Berlaku	LPE Adh Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011*)	17.120.524,47	7.701.017,50	7,71	4,45
2012**)	18.559.472,18	8.049.444,79	8,40	4,52
2013***)	19.940.306,92	8.299.369,54	7,44	3,10

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

***) Angka sangat sementara

Sumber: Buku Indikator Makro Kab.Subang-Bappeda & BPS, 2013

Struktur Perekonomian

Sistem perekonomian di suatu wilayah dapat digambarkan oleh sistem ekonomi yang dibentuk oleh wilayah tersebut. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian di suatu wilayah adalah distribusi persentase PDRB sektoral. Distribusi PDRB sektoral menggambarkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentasenya maka semakin besar pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan di wilayah tersebut.

Pada tabel 4.2, diperlihatkan bahwa Struktur perekonomian di Kabupaten Subang pada periode 2011–2013 menurut kelompok sektor relatif tidak mengalami pergeseran. Kelompok sektor primer masih tetap pada posisi teratas, sektor tersier yang menempati peringkat ke dua dan sektor sekunder menempati tempat ketiga.

**Tabel 4.2 Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku
PDRB Sektoral Kab. Subang Tahun 2011-2013 (persen)**

KELOMPOK SEKTOR	2011	2012*)	2013**)
[1]	[2]	[3]	[4]
PRIMER	43,69	42,60	42,43
Pertanian	36,59	35,18	34,89
Pertambangan	7,10	7,42	7,54
SEKUNDER	17,73	18,25	19,10
Industri Pengolahan	12,99	13,45	14,27
Listrik, gas dan air bersih	0,77	0,76	0,87
Bangunan	3,97	4,04	3,96
TERSIER	38,58	39,15	38,47
Perdagangan	20,90	21,44	20,99
Pengangkutan	6,98	6,74	6,63
Keuangan	3,79	3,87	3,80
Jasa	6,90	7,09	7,05
Jumlah	100	100	100

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber: Buku Indikator Makro Kab.Subang-Bappeda & BPS, 2013

PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita sering dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan dapat dikatakan bertambah baik. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk yang dipakai dalam perhitungan ini adalah estimasi penduduk pertengahan tahun 2013 dari hasil proyeksi penduduk.

Berdasarkan tabel di bawah dapat kita lihat bahwa secara umum PDRB perkapita yang diterima penduduk Kabupaten Subang baik PDRB perkapita dengan migas maupun tanpa migas dan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sehingga menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduknya mengalami peningkatan.

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Kab. Subang Tahun 2011-2013 (rupiah)

Tahun	Harga *) Berlaku	Harga *) Konstan	Harga **) Berlaku	Harga **) Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	11.479.006	5.163.395	10.672.137	4.606.327
2012	12.393.629	5.375.252	11.483.200	4.780.949
2013	13.208.948	5.497.706	12.222.245	4.910.057

Ket. *) PDRB perkapita dengan migas

**) PDRB perkapita tanpa migas

Sumber: Buku Indikator Makro Kab.Subang-Bappeda & BPS, 2013

Pada tahun 2013 PDRB perkapita dengan migas atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 13.321.068,-. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap individu di Kabupaten Subang memiliki pendapatan per tahun rata-rata sekitar 13 jutaan rupiah per tahunnya. Namun nilai ini belum menggambarkan secara riil daya beli masyarakat Kabupaten Subang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung adalah berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan masih mengandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 12.534.256,-. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro, walaupun diindikasikan peningkatan kesejahteraan tersebut tidak terjadi secara merata.

Sektor Ekonomi yang dominan

Peranan/kontribusi sektor ekonomi yang dominan di suatu wilayah menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi penggerak perekonomian di wilayah itu. Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Subang dalam 10 tahun terakhir belum mengalami pergeseran. Sektor Pertanian masih menjadi sektor yang paling dominan. Melekatnya Subang sebagai salah satu lumbung padinya Jawa Barat dan sebagai daerah penghasil buah-buahan seperti nanas dan rambutan menjadikan gambaran bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Subang.

Sektor dominan yang kedua dalam perekonomian Kabupaten Subang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan industri pengolahan menjadi kontributor ketiga dalam struktur perekonomian di Kabupaten Subang. Perkembangan perekonomian Kabupaten Subang tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Salah satu pendukung utama perekonomian Kabupaten Subang adalah sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian ditandai dengan sumbangannya yang cukup besar terhadap PDRB.

Tabel 4.4 Kontribusi Sektor Ekonomi yang dominan terhadap PDRB Kab.Subang Tahun 2011-2013 (persen)

Lapangan Usaha/Sektor	Tahun		
	2011	2012*)	2013**)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pertanian	36,59	35,18	34,89
02. Pertambangan & Penggalian	7,10	7,42	7,54
03. Industri Pengolahan	12,99	13,45	14,27
04. Listrik dan Air Bersih	0,77	0,76	0,87
05. Bangunan/Konstruksi	3,97	4,04	3,96
06. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,90	21,44	20,99
07. Pengangkutan dan Komunikasi	6,98	6,74	6,63
08. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,79	3,87	3,80
09. Jasa – jasa	6,90	7,09	7,05
Total	100,00	100,00	100,00

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber: Buku Indikator Makro Kab.Subang-Bappeda & BPS, 2013

4.1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab.Subang

Letak Geografis Kecamatan

Secara geografis Kabupaten Subang terletak di Jawa Barat bagian utara, karakteristik sosial budaya masyarakat antar kecamatan cukup beragam. Kondisi ini erat kaitannya dengan topologi wilayah tempat domosili penduduk yang sangat berbeda. Penduduk yang berdomisili di kecamatan-kecamatan bagian selatan wilayah Kabupaten Subang (sebesar 23,63 persen luas wilayah) menempati daerah pegunungan. Bagi yang berada di kecamatan pada bagian tengah yang merupakan bagian terbesar (48,37 persen) menempati daerah pedataran. Dan 28,00 persen dari luas wilayah berada di sekitar pantai dan ditempati oleh 29,89 persen penduduk Kabupaten Subang.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Subang

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten (Perda No. 3 Tahun 2014) tentang RTRW meliputi:

- a. pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
- b. pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
- d. pemantapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- e. pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;
- f. peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
- g. pemantapan fungsi kawasan lindung;
- h. pengoptimalanpotensialbudidaya dan sumberdayaalam; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2. Analisa Kawasan Cepat Tumbuh Perdagangan, Transportasi dan Industri Kecil

Mengacu kepada Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kab. Subang, telah ditetapkan 10 kawasan cepat tumbuh meliputi 7 wilayah sebagai pusat kegiatan lokal (PPK) dan 3 pusat pelayanan kawasan (PPK). Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan untuk kawasan kecamatan dan kota-kota kecamatan yang berdekatan.

Analisa terhadap pertumbuhan pada penelitian ini akan dilakukan terhadap 10 kecamatan tersebut yang dapat dirinci sebagai berikut:

No	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	No	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
1	Perkotaan Pamanukan	1	Kecamatan Pabuaran
2	Perkotaan Subang	2	Kecamatan Blanakan
3	Perkotaan Jalancagak	3	Kecamatan Cibogo
4	Perkotaan Ciasem		
5	Perkotaan Pagaden		
6	Perkotaan Kalijati		
7	Perkotaan Pusakanagara		

Analisa pertumbuhan pada kawasan cepat tumbuh diatas menggunakan Analisa *Location Quotient* (LQ). Melalui analisa tersebut dapat diketahui basis kegiatan ekonomi atau komoditi yang menjadi andalan pada wilayah tersebut. Kategori nilai $LQ > 1$ artinya wilayah basis pertumbuhan bagi aktivitas maupun komoditi andalan dan Kategori nilai $LQ \leq 1$ artinya bukan basis pertumbuhan. Pada sub bab ini akan dipaparkan analisa pertumbuhan pada wilayah PKL dan PPK dilihat dari beberapa aspek yaitu perdagangan, transportasi dan industri kecil.

4.2.1 Analisa Kawasan Cepat Tumbuh Perdagangan

Terlebih dahulu dapat kita analisa dari sisi sektor perdagangan dengan indikator jumlah perusahaan besar, menengah dan kecil di 10 wilayah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Jumlah Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil Bidang Usaha Perdagangan di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Perusahaan Besar	Perusahaan Menengah	Perusahaan Kecil	Total
1	Pamanukan	2	12	44	58
2	Subang	2	22	59	83
3	Jalan Cagak	2	11	45	58
4	Ciasem	2	12	48	62
5	Pagaden	2	11	48	61
6	Kalijati	3	12	41	56
7	Pusakanagara	2	11	40	53
8	Pabuaran	2	12	38	52
9	Blanakan	2	11	37	50
10	Cibogo	1	15	40	56
11	Kab. Subang	59	355	1247	1661

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Jumlah perusahaan pedagang besar yang tertinggi berada di kecamatan Kalijati sedangkan perusahaan menengah dan perusahaan kecil yang tertinggi berada di kecamatan Subang. Berikut ini dengan menggunakan analisis LQ dapat diketahui kondisi basis atau bukan basis perusahaan perdagangan baik skala besar, menengah, dan kecil pada kawasan pertumbuhan yang dianalisis.

**Tabel 4.12LQ Perdagangan skala Besar, Menengah dan Kecil
di 10 Kawasan Pertumbuhan**

No	Kecamatan	Perusahaan Besar	Perusahaan Menengah	Perusahaan Kecil
1	Pamanukan	1	1	1
2	Subang	0,7	1,2	0,9
3	Jalan Cagak	1	0,9	1
4	Ciasem	0,9	0,9	1
5	Pagaden	0,9	0,8	1
6	Kalijati	1,5	1	1
7	Pusakanagara	1,1	1	1
8	Pabuaran	1,1	1,1	1
9	Blanakan	1,1	1	1
10	Cibogo	0,5	1,3	1

Sumber: Data Diolah (SDA 2013)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa basis pertumbuhan perdagangan skala besar terdapat di empat kawasan (Kalijati, Pusakanagara, Pabuaran, dan Blanakan). Basis pertumbuhan perdagangan skala menengah terdapat di tiga kawasan (Cibogo, Subang dan Pabuaran). Kemudian basis pertumbuhan perdagangan skala kecil tidak menjadi basis di 10 kawasan ini, artinya perdagangan skala kecil memiliki pola penyebaran merata antara kawasan pusat pertumbuhan dan bukan kawasan pusat pertumbuhan.

Proporsi Jumlah usaha perdagangan skala kecil terhadap jumlah usaha perdagangan di Kab. Subang cukup signifikan yaitu 1274 perusahaan (75%). Proporsi jumlah usaha perdagangan skala menengah sebesar 355 perusahaan (28%), sedangkan proporsi jumlah usaha perdagangan besar yaitu 59 perusahaan (16%).

Kawasan Cepat Tumbuh Bidang Perdagangan Berdasarkan Pertumbuhan Pasar

Adapun dari aspek pasar, maka dapat kita dapatkan gambaran umum basis pertumbuhan pasar di 10 kawasan pertumbuhan dengan kategori pasar pemkab/desa, pasar swasta/modern dan mini market. Dengan hasil analisis data secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.13 Jumlah Pasar Pemerintah, Swasta/Modern dan Mini Market

No	Kecamatan	Pasar Pemda/Desa	Swasta/Modern	Mini Market	Total
1	Pamanukan	2	1	4	7
2	Subang	4	2	18	24
3	Jalan Cagak	2	0	3	5
4	Ciasem	2	0	6	8
5	Pagaden	3	0	9	12
6	Kalijati	1	0	5	6
7	Pusakanagara	1	0	4	5
8	Pabuaran	3	0	2	5
9	Blanakan	1	0	2	3
10	Cibogo	0	0	4	4
11	Kab. Subang	29	3	91	123

Sumber: Data Diolah (SDA 2013)

Dalam tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak pasar pemerintah, pasar swasta modern, dan Mini market terdapat di Perkotaan Subang. Berikut ini dengan menggunakan analisis LQ dapat diketahui kondisi basis atau bukan basis pertumbuhan pasar pada kawasan pertumbuhan yang dianalisis.

Tabel 4.16 LQ Pasar Pemerintah, Swasta dan Mini Market di 10 Kawasan Pertumbuhan.

No	Kecamatan	Pasar Pemda/Desa	Pasar Swasta/Modern	Pasar Mini Market
1	Pamanukan	1,2	5,9	0,8
2	Subang	0,7	3,4	1
3	Jalan Cagak	1,7	0	0,8
4	Ciasem	1,1	0	1
5	Pagaden	1,1	0	1
6	Kalijati	0,7	0	1,1
7	Pusakanagara	0,8	0	1,1
8	Pabuaran	2,5	0	0,5
9	Blanakan	1,4	0	0,9
10	Cibogo	0	0	1,4

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Berdasarkan data yang telah diolah maka dapat disimpulkan bahwa basis pertumbuhan pasar yang dominan dari 10 kawasan pertumbuhan yang dianalisis adalah kawasan perkotaan Pamanukan dengan kategori pasar Pemda/Desa dan Pasar Swasta/Modern. Sementara di Kawasan pertumbuhan lain secara merata menjadi basis pertumbuhan pasar pada satu kategori pasar.

Proporsi jumlah pasar yang ada di 10 wilayah kawasan pertumbuhan terhadap jumlah pasar keseluruhan di Kabupaten Subang adalah 79 pasar (64%). Jumlah seluruh pasar di Kabupaten Subang sendiri berjumlah 123 pasar. Proporsi pasar terhadap keseluruhan pasar yaitu pasar pemda 29 pasar (24%), pasar swasta/modern yaitu 3 pasar (2%) dan mini market 91 pasar (74%).

Kawasan Cepat Tumbuh Bidang Perdagangan Berdasarkan Pertumbuhan Ruko, Toko, Los dan Jongko

Adapun dari aspek pertumbuhan ruko, toko, los dan jongko, maka dapat kita dapatkan gambaran umum basis pertumbuhannya di 10 kawasan pertumbuhan. Dengan hasil analisis data secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.17 Jumlah Ruko, Toko, Los, Jongko di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Ruko	Toko	Los	Jongko	Total
1	Pamanukan	21	701	316	65	1103
2	Subang	68	734	840	265	1907
3	Jalan Cagak	0	271	395	188	854
4	Ciasem	19	543	162	147	871
5	Pagaden	0	285	130	12	427
6	Kalijati	0	184	224	125	533
7	Pusakanagara	0	159	84	8	251
8	Pabuaran	0	160	0	50	210
9	Blanakan	0	68	0	0	68
10	Cibogo	0	0	0	0	0
11	Kab. Subang	116	4213	2878	1529	8736

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Dalam tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa jumlah ruko dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah Perkotaan Subang, kemudian disusul dengan pamanukan dan ciasem. Jumlah toko terbanyak di perkotaan Subang kemudian disusul oleh Pamanukan, Ciasem, Pagaden dan Jalan Cagak. Jumlah los terbanyak terdapat di kawasan Subang disusul kemudian Jalan Cagak dan Pamanukan. Sedangkan untuk Jongko dengan jumlah terbanyak terdapat di Subang kemudian disusul oleh Jalan Cagak, Ciasem dan Kalijati.

Berikut ini dengan menggunakan analisis LQ dapat diketahui kondisi basis atau bukan basis pertumbuhan Ruko, Toko, Los dan Jongko pada kawasan pertumbuhan yang dianalisis.

Tabel 4.22 LQ Ruko, Toko, Los dan Jongko di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Ruko	Toko	Los	Jongko
1	Pamanukan	1,4	1,3	0,9	0,3
2	Subang	2,7	0,8	1,3	0,8
3	Jalan Cagak	0	0,7	1,4	1,3
4	Ciasem	1,6	1,3	0,6	1
5	Pagaden	0	1,4	0,9	0,2
6	Kalijati	0	0,7	1,3	1,3
7	Pusakanagara	0	1,3	1	0,2
8	Pabuaran	0	1,6	0	1,4
9	Blanakan	0	2,1	0	0
10	Cibogo	0	0	0	0

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Output data diolah diatas menunjukkan terdapat tiga kawasan pertumbuhan ruko dengan basis pertumbuhan tertinggi terdapat di kawasan Subang, enam kawasan pertumbuhan Toko dengan basis pertumbuhan tertinggi kawasan Blanakan, serta tiga kawasan pertumbuhan los dan jomgko dengan masing-masing pusat pertumbuhan tertinggi terdapat di kawasan Jalan Cagak dan Pabuaran.

Proporsi Jumlah Ruko terhadap jumlah Ruko, Toko, Los dan Jongko di Seluruh Kabupaten Subang adalah (1,3%) kemudian disusul berturut-turut untuk Toko (48,2%), Los (32,9%) dan Jongko (17,5%). Di dalam 10 kawasan pertumbuhan ini terdapat jumlah ruko, toko, los dan jongko sebanyak 6224 buah atau 71,2%.

4.2.2 Kawasan Cepat Tumbuh Bidang Transportasi

Adapun dari aspek pertumbuhan transportasi yang dikategorikan dengan kendaraan Angkot, Minibus, Pick Up dan Truck, maka dapat kita dapatkan gambaran umum basis pertumbuhannya di 10 kawasan pertumbuhan. Dengan hasil analisis data secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.23 Jumlah Angkot, Minibus, Pick Up dan Truck di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Angkot	Mini Bus	Pick Up	Truck	Total
1	Pamanukan	1	10	376	350	737
2	Subang	237	71	362	314	984
3	Jalan Cagak	78	23	147	62	310
4	Ciasem	15	69	254	186	524
5	Pagaden	80	39	267	192	578
6	Kalijati	71	34	208	151	464
7	Pusakanagara	8	6	148	167	329
8	Pabuaran	5	64	184	166	419
9	Blanakan	8	12	106	79	205
10	Cibogo	51	10	82	49	192
11	Kab. Subang	825	593	4088	2961	8467

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Dalam tabel 4.22 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan transportasi Angkot dan Mini Bus dengan jumlah terbanyak terdapat di wilayah Perkotaan Subang. Jumlah kendaraan Transportasi Pick Up dan Truck dengan jumlah terbanyak terdapat di kawasan Pamanukan. Proporsi Jumlah Angkot terhadap seluruh kendaraan transportasi di Seluruh Kabupaten Subang adalah (10%) kemudian disusul berturut-turut untuk Mini Bus (7%), Pick Up (48%) dan Truck (35%). Di dalam 10 kawasan pertumbuhan ini terdapat jumlah angkot, mini bus, pick up dan truck sebanyak 4742 buah atau 56 %.

Berikut ini dengan menggunakan analisis LQ dapat diketahui kondisi basis atau bukan basis kendaraan transportasi Angkot, Mini Bus, Pick Up dan Truck pada kawasan pertumbuhan yang dianalisis.

Tabel 4.28 LQ Angkot, Mini Bus, Pick Up dan Truck di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Angkot	Mini Bus	Pick Up	Truck
1	Pamanukan	0	0,2	0,9	1,4
2	Subang	2,5	1	1,3	0,9
3	Jalan Cagak	2,6	1,1	1,4	0,6
4	Ciasem	0,3	1,9	0,6	1
5	Pagaden	1,4	1	0,9	0,9
6	Kalijati	1,6	1	1,3	0,9
7	Pusakanagara	0,2	0,3	1	1,5
8	Pabuaran	0,1	2,2	0	1,1
9	Blanakan	0,4	0,8	0	1,1
10	Cibogo	2,7	0,7	0	0,7

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Berdasarkan output data diolah diatas, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- Basis pertumbuhan kendaraan transportasi angkot terdapat di lima kawasan (Cibogo, Jalan Cagak, dan Subang, Kalijati dan Pagaden).
- Basis pertumbuhan kendaraan transportasi mini bus terdapat di tiga kawasan (Pabuaran, Ciasem dan Jalan Cagak).
- Basis pertumbuhan kendaraan transportasi pick up terdapat di dua kawasan (Pamanukan dan Blanakan).
- Basis pertumbuhan kendaraan transportasi truck terdapat di empat kawasan (Pusakanagara, Pamanukan, Pabuaran dan Blanakan).
- Basis pertumbuhan transportasi paling memusat di kawasan Jalan Cagak. Kendaraan transportasi angkutan barang lebih banyak memusat di kawasan daerah Subang Utara (pantura).

4.2.3 Kawasan Cepat Tumbuh Bidang Industri Pengolahan Skala Kecil

Pengukuran pertumbuhan industri pengolahan skala kecil menggunakan dua kategori penilaian yaitu nilai investasi dan nilai produksi. Gambaran umum basis pertumbuhannya di 10 kawasan pertumbuhan terkait, dengan hasil analisis data secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri Pengolahan Skala Kecil di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Nilai Investasi	Nilai Produksi	Total
1	Pamanukan	601780	4170976	4772756
2	Subang	1000175	6631162	7631337
3	Jalan Cagak	206300	1406460	1612760
4	Ciasem	1275413	4771438	6046851
5	Pagaden	1256005	5305971	6561976
6	Kalijati	355000	3240000	3595000
7	Pusakanagara	297000	2032200	2329200
8	Pabuaran	602800	3482072	4084872
9	Blanakan	615233	2508828	3124061
10	Cibogo	130500	1516160	1646660
11	Kab. Subang	13159316	131968086	145127402

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Dalam tabel 4.28 diatas dapat diketahui bahwa nilai investasi industri kecil tertinggi yaitu di kawasan Ciasem, Pagaden dan Subang. Nilai produksi industri kecil tertinggi yaitu kawasan Subang, Pagaden dan Ciasem.

Proporsi Nilai Investasi industri kecil di 10 kawasan pertumbuhan terhadap Nilai Investasi industri kecil di Kabupaten Subang adalah (48%), sedangkan Nilai Produksi industri kecil di 10 kawasan pertumbuhan terhadap Nilai Produksi keseluruhan industri kecil di Kabupaten Subang adalah (27%).

Di dalam 10 kawasan pertumbuhan ini total nilai investasi dan nilai produksi secara proporsi terhadap nilai investasi dan nilai produksi industri kecil di keseluruhan Kabupaten Subang adalah sebesar 29%. Berikut ini dengan menggunakan analisis LQ dapat diketahui kondisi basis atau bukan basis industri kecil (investasi dan produksi) pada kawasan pertumbuhan yang dianalisis.

Tabel 4.32 LQ Nilai Investasi & Nilai Produksi di 10 Kawasan Pertumbuhan

No	Kecamatan	Nilai Investasi	Nilai Produksi
1	Pamanukan	1,4	1
2	Subang	1,4	1
3	Jalan Cagak	1,4	1
4	Ciasem	2,3	0,9
5	Pagaden	2,1	0,9
6	Kalijati	1,1	1
7	Pusakanagara	1,4	1
8	Pabuaran	1,6	0,9
9	Blanakan	2,2	0,9
10	Cibogo	0,9	1

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Berdasarkan data yang telah diolah maka dapat ditemukan bahwa kawasan yang menjadi Basis investasi industri kecil terdapat di sembilan kawasan dari peringkat terbaik berturut-turut adalah Ciasem, Blanakan, Pagaden, Pabuaran Pusakanagara, Pamanukan , Subang, Jalan Cagak dan Kalijati. Kemudian 10 kawasan pertumbuhan diketahui bukan merupakan Basis investasi industri kecil.

4.3 Analisa Kawasan Cepat Tumbuh Pertanian

Pada sub bab ini akan dipaparkan analisa pertumbuhan pada wilayah PKL dan PPK dilihat dari aspek pertanian dan hortikultura. Melalui Analisa *Location Quotient* (LQ) dapat diketahui basis kegiatan ekonomi atau komoditi yang menjadi andalan pada 10 wilayah pusat pertumbuhan. Kategori nilai $LQ > 1$ artinya wilayah basis pertumbuhan bagi aktivitas maupun komoditi andalan dan Kategori nilai $LQ \leq 1$ artinya bukan basis pertumbuhan.

4.4.1 LQ Komoditas Padi-Palawija

Tabel 4.33 LQ Komoditas Padi-Palawija di 10 Kawasan Pertumbuhan

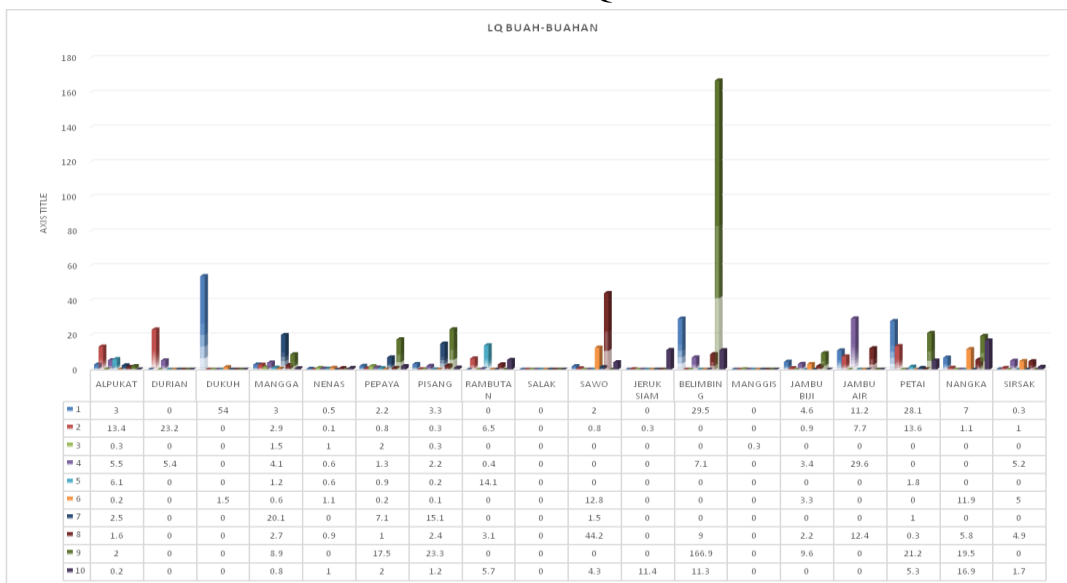
NO	KECAMATAN	PADI		JAGUNG		UBI KAYU		UBI JALAR		KACANG TANAH		KEDELE	
		1,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
1	PAMANUKAN	1,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
2	SUBANG	1,0	-	1,7	+	1,5	+	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3	JALAN CAGAK	0,9	-	8,3	+	3,5	+	30,5	+	0,0	-	0,0	-
4	CIASEM	1,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
5	PAGADEN	1,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	4,5	+	8,1	+
6	KALIJATI	1,0	-	1,6	+	0,0	-	0,0	-	0,2	-	0,4	-
7	PUSAKANAGARA	1,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
8	PABUARAN	1,0	-	0,7	-	0,0	-	2,6	+	1,3	+	2,4	+
9	BLANAKAN	1,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
10	CIBOGO	1,0	-	3,4	+	0,0	-	1,5	+	2,3	+	4,2	+

Sumber : Data Diolah (SDA 2013)

Berdasarkan data yang telah diolah maka dapat ditemukan bahwa kawasan yang menjadi Basis komoditi unggulan Padi tidak ada di dalam 10 kawasan pertumbuhan yang dianalisa. Kemudian untuk Basis komoditi unggulan Jagung terpusat di empat kecamatan (Jalan Cagak, Cibogo, Subang dan Kalijati). Basis komoditi unggulan Ubi Kayu terpusat di dua kecamatan (Jalan Cagak, dan Subang). Basis komoditi unggulan Ubi Jalar terpusat di Tiga Kecamatan (Jalan Cagak, Pabuaran dan Cibogo). Basis komoditi unggulan Kacang Tanah terpusat di Tiga Kecamatan (Pagaden, Cibogo dan Pabuaran). Dan selanjutnya yang terakhir Basis komoditi unggulan Kedelai Tanah juga terpusat di Tiga Kecamatan (Pagaden, Cibogo dan Pabuaran).

4.4.2 LQ Komoditas Buah

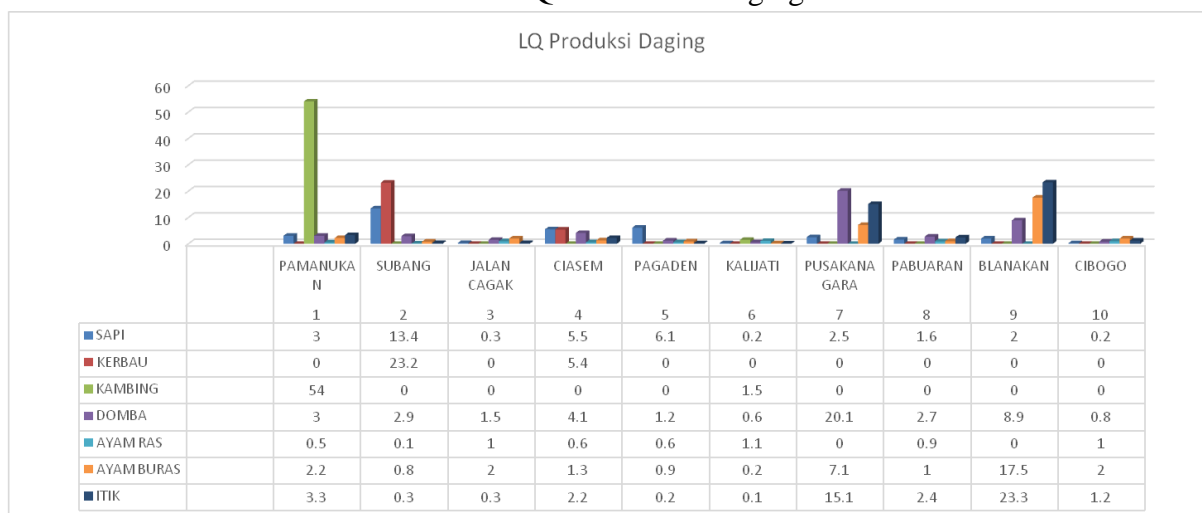
Gambar. 4.3 LQ Komoditas Buah



Basis komoditi unggulan Buah Alpukat terpusat pada enam kawasan yaitu Subang, Pagaden, Ciasem, Pamanukan, Pusakanagara, dan Pabuaran. Basis komoditi unggulan Durian terpusat di Subang dan Ciasem. Basis komoditi unggulan Duku terpusat di Pamanukan dan Kalijati. Basis komoditi unggulan Mangga terpusat di Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Ciasem, Pagaden, Pusakanagara, Pabuaran dan Blanakan. Basis komoditi unggulan Nenas terpusat di Kalijati. Basis komoditi unggulan Pepaya terpusat di Pamanukan, Jalan Cagak, Ciasem, Pusakanagara, Blanakan dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Pisang terpusat di Pamanukan, Ciasem, Pusakanagara, Pabuaran, Blanakan dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Rambutan terpusat di Subang, Pagaden, Pabuaran dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Sawo terpusat di Pamanukan, Kalijati, Pusakanagara, Pabuaran dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Jeruk Siam terpusat di Cibogo. Basis komoditi unggulan Belimbing terpusat di Pamanukan, Ciasem, Blanakan dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Jambu Biji terpusat di Pamanukan, Ciasem, Kalijati, Pabuaran dan Blanakan. Basis komoditi unggulan Jambu Air terpusat di Pamanukan, Subang, Ciasem dan Pabuaran. Basis komoditi unggulan Petai terpusat di Pamanukan, Subang, Pagaden, Blanakan dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Nangka terpusat di Pamanukan, Subang, Kalijati, Pabuaran, Blanakan dan Cibogo. Basis komoditi unggulan Sirsak terpusat di Ciasem, Pabuaran dan Cibogo.

4.4.3 LQ Komoditas Daging

Gambar. 4.4 LQ Komoditas Daging



Basis komoditi unggulan daging Sapi terpusat pada tujuh kawasan yaitu di Pamanukan, Subang, Ciasem, Pagaden, Pusakanagara, Pabuaran dan Blanakan. Basis komoditi unggulan daging Kerbau yaitu terpusat di kawasan Subang dan Ciasem. Basis komoditi unggulan daging Kambing terpusat di Pamanukan dan Kalijati. Basis komoditi unggulandaging Domba terpusat pada delapan kawasan yaitu di Pamanukan, Subang, Jalancagak, Ciasem, Pagaden, Pusakanagara, Pabuaran dan Blanakan. Basis komoditi unggulan daging Ayam Ras terpusat di kawasan Kalijati. Basis unggulan daging Ayam Buras terpusat pada enam kawasan yaitu di Pamanukan, Jalancagak, Ciasem,

Pusakanagara, Blanakan dan Cibogo. Basis komoditi daging Itik terpusat pada enam kawasan yaitu di Pamanukan, Ciasem, Pusakanagara, Pabuaran, Blanakan dan Cibogo.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dipetakan kekuatan basis komoditi atau kegiatan serta fasilitas perekonomian yang tumbuh di kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal Pamanukan

Pada sektor pertanian, PKL Pamanukan bukanlah basis. Pada sektor hortikultura PKL Pamanukan memiliki basis komoditi buah Duku, Belimbing, Petai, Alpukat, Mangga, Pepaya, Pisang, Sawo, Jambu Biji, Jambu Air, dan Nangka. Pada sektor peternakan memiliki basis produksi Kambing, Sapi, Ayam Buras dan Itik. Pada sektor pasar memiliki basis Pasar Pemda dan pasar Swasta/Modern. Pada Sektor perdagangan basis Ruko dan Toko. Pada sektor alat transportasi PKL Pamanukan merupakan basis kendaraan Truck. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

2. Pusat Kegiatan Lokal Subang

Pada sektor pertanian, PKL Subang merupakan basis komoditi Jagung dan Ubi Kayu. Pada sektor hortikultura PKL Subang memiliki basis komoditi Durian, Alpukat, Petai, Mangga, Rambutan, Jambu Air dan Nangka. Pada sektor peternakan memiliki basis produksi Kerbau, Sapi, dan Domba. Pada sektor pasar memiliki basis pasar Swasta/Modern. Pada Sektor perdagangan basis Ruko dan Los. Pada sektor alat transportasi PKL Subang merupakan basis kendaraan Angkot dan Pick Up. Sektor perdagangan merupakan basis perusahaan perdagangan skala menengah. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

3. Pusat Kegiatan Lokal Jalan Cagak

Pada sektor pertanian, PKL Jalan Cagak merupakan basis komoditi Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Pada sektor hortikultura PKL Jalan Cagak memiliki basis komoditi Mangga, dan Pepaya. Pada sektor peternakan basis produksi daging Kambing. Pada sektor pasar memiliki basis pasar pemda. Pada Sektor perdagangan basis Los dan Jongko. Pada sektor alat transportasi PKL Jalan Cagak merupakan basis kendaraan Angkot, Minibus dan Pick Up. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

4. Pusat Kegiatan Lokal Ciasem

Pada sektor pertanian, PKL Ciasem bukan merupakan basis. Pada sektor hortikultura PKL Ciasem memiliki basis komoditi Jambu Air, Sirsak, Jambu Biji, Belimbing, Pisang, Pepaya, Mangga, Durian dan Alpukat. Pada sektor peternakan

basis produksi daging Sapi, Kerbau, Domba, Ayam Buras dan Itik. Pada sektor pasar memiliki basis pasar pemda. Pada Sektor perdagangan basis Ruko dan Toko. Pada sektor alat transportasi PKL Ciasem merupakan basis kendaraan Minibus. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

5. Pusat Kegiatan Lokal Pagaden

Pada sektor pertanian, PKL Pagaden merupakan basis kacang tanah dan kedelai. Pada sektor hortikultura PKL Pagaden memiliki basis komoditi Alpukat, Mangga, Rambutan dan Petai. Pada sektor peternakan basis Sapi dan Domba. Pada Sektor perdagangan basis Toko. Pada sektor alat transportasi PKL Pagaden merupakan basis kendaraan Angkot. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

6. Pusat Kegiatan Lokal Kalijati

Pada sektor pertanian, PKL Kalijati merupakan basis Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalur. Pada sektor hortikultura PKL Pagaden memiliki basis komoditi Mangga, dan Pepaya. Pada sektor peternakan basis Domba. Pada sektor pasar menjadi basis pasar Pemda. Pada Sektor perdagangan basis Los dan Jongko. Pada sektor alat transportasi PKL Pagaden merupakan basis kendaraan Angkot, Minibus dan Pick Up. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

7. Pusat Kegiatan Lokal Pusakanagara

Pada sektor pertanian, PKL Pusakanagara bukan merupakan basis. Pada sektor hortikultura PKL Pusakanagara memiliki basis Mangga, Pepaya, Pisang, dan Sawo. Pada sektor peternakan basis Domba, Itik, Ayam Buras dan Sapi. Pada sektor pasar menjadi basis pasar Mini Market. Pada Sektor perdagangan basis Toko. Pada sektor alat transportasi PKL Pusakanagara merupakan basis kendaraan Truck. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

8. Pusat Pelayanan Kawasan Pabuaran

Pada sektor pertanian, PPK Pabuaran merupakan basis Ubi Jalar, Kacang tanah dan Kedelai. Pada sektor hortikultura PPKPabuaran memiliki basis Sawo Mangga, Alpukat, Pisang, Belimbing, Jambu Biji, Jambu Air, Nangka, dan Sirsak. Pada sektor peternakan basis Domba, Itik, Ayam Buras dan Sapi. Pada sektor pasar menjadi basis pasar Pemda. Pada Sektor perdagangan basis Perusahaan Menengah dan Besar. Merupakan basis Toko dan Jongko. Pada sektor alat transportasi PPKPabuaran merupakan basis kendaraan Mini Bus dan Truck. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

9. Pusat Pelayanan Kawasan Blanakan

Pada sektor pertanian, PPK Blanakan bukan merupakan basis. Pada sektor hortikultura PPK Pusakanagara memiliki basis Belimbing, Alpukat, Mangga,

Pepaya, Pisang, Jambu Biji, Petai dan Nangka. Pada sektor peternakan basis Sapi, Domba, Itik, dan Ayam Buras. Pada sektor pasar menjadi basis pasar Pemda. Pada Sektor perdagangan basis Perusahaan Perdagangan skala Besar. Merupakan basis Toko. Pada sektor alat transportasi PPK Pusakanagara merupakan basis kendaraan Truck. Untuk sektor Industri Pengolahan merupakan basis investasi industri kecil.

10. Pusat Pelayanan Kawasan Cibogo

Pada sektor pertanian, PPK Cibogo merupakan basis Jagung, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kedelai. Pada sektor hortikultura PPK Cibogo memiliki basis Nangka, Belimbing, Jeruk Siam, Pepaya, Pisang, Rambutan, Petai, Sawo dan Sirsak. Pada sektor peternakan basis Itik, dan Ayam Buras. Pada sektor pasar menjadi basis Mini Market. Pada Sektor perdagangan basis Perusahaan Perdagangan skala Menengah. Pada sektor alat transportasi PPK Cibogo merupakan basis kendaraan Angkot.

DAFTAR PUSTAKA

- Aime Heene, dkk 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Refika Aditama. Bandung
- BPPD dan BPS, 2013. Indikator Makroekonomi Kabupaten Subang Tahun 2013. Kabupaten Subang.
- BPS, Subang dalam Angka Tahun 2013.
- PEMKAB SUBANG, Perda No. 3 RTRW Kab. Subang, Tahun 2014